

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Probolinggo, sehingga Renja Perubahan Perangkat Daerah juga harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD 2025 menjadi dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan

kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah serta selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Renja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan *review* berkala atas implementasinya.

Demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan *stakeholder* di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di

daerah yang berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai *stakeholder* di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Renstra lima tahunan Perangkat Daerah, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Renja tahunan Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo menyusun Renja Perubahan tahun 2025.

Dalam perjalanan waktu bisa terjadi perkembangan yang menyebabkan Renja Perangkat Daerah tidak sesuai dengan keadaan. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam pasal 343 ayat 1 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, maka diamanatkan bagi Perangkat Daerah untuk memenuhi ketentuan dimaksud, diantaranya dengan menambah/mengurangi/menggeser anggaran disesuaikan dengan ketentuan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo perlu diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025, sedangkan anggaran disesuaikan dengan plafon pagu indikatif Tahun Anggaran 2025 yang telah disesuaikan.

Atas hal tersebut, dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 disamping berpedoman pada Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo tahun 2024 – 2026, juga diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu memuat pula keterangan, antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo. Adapun indikator rencana kinerja meliputi sasaran, program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 18 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 35 Tahun 2023 Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 adalah sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam

mencapai dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
2. Memberikan gambaran kemampuan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan misinya untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pimpinan instansi;
3. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo serta indikator atau ukuran keberhasilan/kegagalan pada tahun 2025;
4. Memberikan arah/acuan dalam penyusunan Program/Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang latar belakang Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Menggambarkan kajian terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 s/d TW I (Maret 2025)

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 setelah Perubahan Renja untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo

BAB IV : PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PD TAHUN 2025
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo tahun lalu (2024), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025), analisis kinerja pelayanan

perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD.

2.1. Realisasi Program dan Kegiatan

Evaluasi kinerja dibutuhkan untuk mengukur tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan secara periodik. Tercapainya atau tidaknya target pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan yang telah disusun dapat diketahui Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut maka RENJA Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian selama tahun 2025 sampai triwulan I bulan Maret. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Rencana Program dan Kegiatan

Kategori Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran	Realisasi Kinerja Pada Tahun 2025
Kinerja SKPD	Renja SKPD Tahun 2025	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2024 s/d tahun 2026 (Periode RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan Renja SKPD Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2026 (%)													
					I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		
					K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah																																	
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakip PD	75	%	60.000.000.000,00	75	%	17.797.317.426,00	75	%	18.345.028.408,00	25,00	%	4.484.721.806,00											25,00	4.484.721.806	0,33	24,45	100,00	22.282.039.232,00	133,33	37,14	
	2.17.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yangdisusun dan dilaporkan tepat waktu	20	Dok	600.000.000,00	19	Dok	190.000.000,00	20	Dok	135.451.400,00	-	Dok	0,00											-	0	-	-	19,00	190.000.000,00	95,00	31,67	
	2.17.01.2.01.0001	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dok	360.000.000,00	19	Dok	115.000.000,00	9	Dok	125.150.000,00		Dok	0,00											-	0	-	-	19,00	115.000.000,00	211,11	31,94	
	2.17.01.2.01.0006	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	Dok	240.000.000,00	11	Dok	75.000.000,00	11	Dok	10.301.400,00	-	Dok	0,00											-	0	-	-	11,00	75.000.000,00	100,00	31,25	
	2.17.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu	19	Dok	42.000.000.000,00	19	Dok	13.317.673.898,00	19	Dok	14.540.669.366,00	8,00	Dok	3.708.105.161,00											8,00	3.708.105.161	0,42	25,50	27,00	17.025.779.059,00	142,11	40,54	
	2.17.01.2.02.0001	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1440	Org	41.580.000.000,00	120	Org	13.262.673.898,00	120	Org	14.534.349.966,00	30,00	Org	3.708.105.161,00											30,00	3.708.105.161	0,25	25,51	150,00	16.970.779.059,00	10,42	40,81	
	2.17.01.2.02.0005	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19	Dok	420.000.000,00	19	Dok	55.000.000,00	19	Dok	6.319.400,00	-	Dok	0,00											-	0	-	-	19,00	55.000.000,00	100,00	13,10	
	2.17.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	4	Dok	300.000.000,00	4	Dok	35.000.000,00	4	Dok	4.106.000,00	-	Dok	0,00											-	0	-	-	4,00	35.000.000,00	100,00	11,67	
	2.17.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Dok	300.000.000,00	5	Dok	35.000.000,00	4	Dok	4.106.000,00	-	Dok	0,00											-	0	-	-	5,00	35.000.000,00	125,00	11,67	
	2.17.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang dilaporkan tepat waktu	21	Dok	300.000.000,00	21	Dok	80.000.000,00	21	Dok	155.030.800,00	15,00	Dok	70.434.500,00											15,00	70.434.500	0,71	45,43	36,00	150.434.500,00	171,43	50,14	
	2.17.01.2.04.0007	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	19	Dok	240.000.000,00	19	Dok	80.000.000,00	19	Dok	155.030.800,00	15,00	Dok	70.434.500,00											15,00	70.434.500	0,79	45,43	34,00	150.434.500,00	178,95	62,68	
	2.17.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemuhan administrasi umum PD	100	%	1.500.000.000,00	100	%	123.271.200	100	%	91.028.250,00	10,00	%	6.747.800,00												10,00	6.747.800	0,10	7,41	110,00	130.019.000,00	110,00	8,67
	2.17.01.2.06.0002	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Unit	600.000.000,00	12	Unit	123.271.200	12	Unit	91.028.250,00	3,00	Unit	6.747.800,00											3,00	6.747.800	0,25	7,41	15,00	130.019.000,00	125,00	21,67	
	2.17.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemuhan BMD yang sesuai dengan RKBMD	50	%	1.200.000.000,00	50	%	248.282.200,00	50	%	216.305.100,00	-	%	0,00												-	0	-	-	50,00	248.282.200,00	100,00	20,69
	2.17.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	Unit	600.000.000,00	40	Unit	248.282.200,00	40	Unit	216.305.100,00	-	Unit	0,00												-	0	-	-	40,00	248.282.200,00	100,00	41,38
	2.17.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjangPD	12	Dok	12.000.000.000,00	12	Dok	3.504.270.128	12	Dok	3.048.371.492,00	4,00	Dok	677.857.945,00											4,00	677.857.945	0,33	22,24	16,00	4.182.128.073,00	133,33	34,85	
	2.17.01.2.08.0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Dok	1.200.000.000,00	12	Dok	135.425.146	12	Dok	98.852.524,00	4,00	Dok	31.563.946,00											4,00	31.563.946	0,33	31,93	16,00	166.989.092,00	133,33	13,92	
	2.17.01.2.08.0003	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Dok	600.000.000,00	12	Dok	30.504.000,00	12	Dok	3.885.000,00	4,00	Dok	520.000,00											4,00	520.000	0,33	13,38	16,00	31.024.000,00	133,33	5,17	
	2.17.01.2.08.0004	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Dok	10.200.000.000,00	12	Dok	3.338.340.982,00	12	Dok	2.945.633.968,00	4,00	Dok	645.773.999,00											4,00	645.773.999	0,33	21,92	16,00	3.984.114.981,00	133,33	39,06	
2.17.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	150	Unit	1.800.000.000,00	150	Unit	298.820.000,00	150	Unit	154.066.000,00	30,00	Unit	21.576.400,00											30,00	21.576.400	0,20	14,00	180,00	320.396.400,00	120,00	17,80		
2.17.01.2.09.0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	Unit	540.000.000,00	40	Unit	108.000.000,00	40	Unit	117.826.000,00	10,00	Unit	18.666.400,00											10,00	18.666.400	0,25	15,84	50,00	126.666.400,00	125,00	23,46		
2.17.01.2.09.0006	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	360.000.000,00	40	Unit	72.050.000,00	40	Unit	20.300.000,00	5,00	Unit	2.910.000,00											5,00	2.910.000	0,13	14,33	45,00	74.960.000,00	112,50	20,82		
2.17.01.2.09.0010	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	360.000.000,00	1	Unit	118.770.000,00	1	Unit	15.940.000,00	-	Unit	0,00											-	0	-	-	1,00	118.770.000,00	100,00	32,99		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2024 s/d tahun 2026 (Periode RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2026 (%)									
														I			II			III									IV							
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%				
					K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	Meningkatnya Omzet Koperasi	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	82	%	375.000.000,00	82	%	80.000.000	82	%	56.207.500,00	10	%	5.300.000,00		K	Sat	Rp		K	Sat	Rp		K	Sat	Rp	10,00	5.300.000	0,12	9,43	92,00	85.300.000,00	112,20	22,75
		2.17.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	82	%	375.000.000,00	82	%	80.000.000	82	%	56.207.500,00	10	%	5.300.000,00													10,00	5.300.000	0,12	9,43	92,00	85.300.000,00	112,20	22,75
		2.17.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40	Unit Usaha	150.000.000,00	40	Unit Usaha	35.000.000,00	40	Unit Usaha	25.403.000,00	10	Unit Usaha	1.700.000,00													10,00	1.700.000	0,25	6,69	50,00	36.700.000,00	125,00	24,47
		2.17.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30	Unit Usaha	187.500.000,00	30	Unit Usaha	45.000.000,00	30	Unit Usaha	30.804.500,00	10	Unit Usaha	3.600.000,00													10,00	3.600.000	0,33	11,69	40,00	48.600.000,00	133,33	25,92
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya	92	%	375.000.000,00	92	%	25.000.000	92	%	23.804.000,00	0	%	0,00													-	0	-	-	92,00	25.000.000,00	100,00	6,67
		2.17.04.2.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya	82	%	375.000.000,00	82	%	25.000.000,00	82	%	23.804.000,00	0	%	0,00													-	0	-	-	82,00	25.000.000,00	100,00	6,67
		2.17.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	40	Unit Usaha	150.000.000,00	82	Unit Usaha	-	30	Unit Usaha	23.804.000,00	0	Unit Usaha	0,00													-	0	-	-	82,00	-	205,00	-
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Kualitas Koperasi yang meningkat kapasitas SDMnya	75	%	600.000.000,00	75	%	105.000.000	75	%	75.030.750,00	20	%	1.150.000,00													20,00	1.150.000	0,27	1,53	95,00	106.150.000,00	126,67	17,69
		2.17.05.2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan	25	%	600.000.000,00	25	%	105.000.000	25	%	75.030.750,00	8	%	1.150.000,00													8,00	1.150.000	0,32	1,53	33,00	106.150.000,00	132,00	17,69
		2.17.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240	Org	600.000.000,00	240	Org	105.000.000	240	Org	75.030.750,00	80	Org	1.150.000,00													80,00	1.150.000	0,33	1,53	320,00	106.150.000,00	133,33	17,69
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya	25	%	375.000.000,00	25	%	125.000.000	25	%	69.631.750,00	10	%	2.799.500,00													10,00	2.799.500	0,40	4,02	35,00	127.799.500,00	140,00	34,08
		2.17.06.2.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	35	Unit Usaha	375.000.000,00	35	Unit Usaha	125.000.000	35	Unit Usaha	69.631.750,00	10	Unit Usaha	2.799.500,00													10,00	2.799.500	0,29	4,02	45,00	127.799.500,00	128,57	34,08
		2.17.06.2.01.0009	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	30	Unit Usaha	206.250.000,00	30	Unit Usaha	125.000.000,00	30	Unit Usaha	69.631.750,00	10	Unit Usaha	2.799.500,00													10,00	2.799.500	0,33	4,02	40,00	127.799.500,00	133,33	61,96

Sasaran		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2024 s/d tahun 2026 (Periode RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2026 (%)		
														I			II			III			IV											
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		
					K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peresentase UM yang meningkat omzetnya	5	%	2.410.000.000,00	5	%	110.000.000,00	5	%	1.070.900.000,00	-	%	0,00											-	0	-	-	5,00	110.000.000,00	100,00	4,56
		2.17.07.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang telah diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	500	Unit Usaha	2.410.000.000,00	500	Unit Usaha	110.000.000,00	600	Unit Usaha	1.070.900.000,00	0	Unit Usaha	0,00											-	0	-	-	500,00	110.000.000,00	100,00	4,56
		2.17.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	105	Unit Usaha	241.000.000,00	105	Unit Usaha	20.000.000,00	110	Unit Usaha	40.000.000,00	0	Unit Usaha	0,00											-	0	-	-	105,00	20.000.000,00	100,00	8,30
		2.17.07.2.01.0003	Sub Kegiatan Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	7.800	Unit Usaha	120.500.000,00	7800	Unit Usaha	20.000.000,00	8.300	Unit Usaha	20.000.000,00	0	Unit Usaha	0,00											-	0	-	-	7.800,00	20.000.000,00	100,00	16,60
		2.17.07.2.01.004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	80	Unit Usaha	723.000.000,00		Unit Usaha	-	100	Unit Usaha	10.900.000,00	0	Unit Usaha	0,00											-	0	-	-	-	-	-	-
		2.17.07.2.01.0015	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	400	Org	723.000.000,00	400	Org	70.000.000,00	425	Org	1.000.000.000,00	0	Org	0,00											-	0	-	-	400,00	70.000.000,00	100,00	9,68
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	0,1	%	895.000.000,00	0,1	%	225.000.000,00	0,1	%	120.000.000,00	0	%	0,00											-	0	-	-	0,10	225.000.000,00	100,00	25,14
		2.17.08.2.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usaha menjadi usaha kecil	1	Unit Usaha	895.000.000,00	1	Unit Usaha	225.000.000,00	2	Unit Usaha	120.000.000,00	0	Unit Usaha	0,00											-	0	-	-	1,00	225.000.000,00	100,00	25,14
		2.17.08.2.01.0006	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	65	Unit Usaha	895.000.000,00	65	Unit Usaha	225.000.000,00	70	Unit Usaha	120.000.000,00	0	Unit Usaha	0,00											-	0	-	-	65,00	225.000.000,00	100,00	25,14

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2024 s/d tahun 2026 (Periode RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2026 (%)				
														I			II			III			IV													
														K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp									K	Sat	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%				
					K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha	20	%	300.000.000,00	20	%	6.150.000,00	20	%	5.044.200,00	5,00	%	1000000	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	5,00	1.000.000	0,25	19,82	25,00	7.150.000,00	125,00	2,38
		3.30.02.2.02	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Tanda Daftar Gudang yang direkomendasikan	5	Unit	105.000.000,00	5	Unit	6.150.000,00	5	Unit	5.044.200,00	1,00	Unit	1000000												1,00	1.000.000	0,20	19,82	6,00	7.150.000,00	120,00	6,81	
		3.30.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	5	Dok	105.000.000,00	5	Dok	6.150.000,00	5	Dok	5.044.200,00	1,00	Dok	1000000												1,00	1.000.000	0,20	19,82	6,00	7.150.000,00	120,00	6,81	
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang berstandar SNI	5,71	%	330.000.000,00	5,71	%	361.193.000,00	8,57	%	2.050.262.000,00	-	%	0,00												-	0	-	-	5,71	361.193.000,00	100,00	109,45	
		3.30.03.2.01.	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	5	Unit	2.475.000.000,00	5	Unit	180.429.000,00	5	Unit	1.957.075.000,00	-	Unit	0,00												-	0	-	-	5,00	180.429.000,00	100,00	7,29	
		3.30.03.2.01.0002	Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	35	Unit	1.608.750.000,00	35	Unit	180.429.000,00	35	Unit	1.957.075.000,00	-	Unit	0,00												-	0	-	-	35,00	180.429.000,00	100,00	11,22	
		3.30.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pembinaan dan pemberdayaan	35	Org	825.000.000,00	35	Org	180.764.000,00	35	Org	93.187.000,00	-	Org	0,00												-	0	-	-	35,00	180.764.000,00	100,00	21,91	
		3.30.03.2.02.0001	Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35	Dok	825.000.000,00	35	Dok	180.764.000,00	35	Dok	93.187.000,00	-	Dok	0,00												-	0	-	-	35,00	180.764.000,00	100,00	21,91	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	61,11	%	900.000.000,00	61,11	%	2.123.495.000,00	61,11	%	956.532.800,00	60,00	%	913.946.000												60,00	913.946.000	0,98	95,55	121,11	3.037.441.000,00	198,18	337,49	
		3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikendalikan	11	Komoditas	720.000.000,00	11	Komoditas	2.109.979.600,00	11	Komoditas	941.283.300,00	10,00	Komoditas	912.946.000												10,00	912.946.000	0,91	96,99	21,00	3.022.925.600,00	190,91	419,85	
		3.30.04.2.02.0002	Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365	Laporan	72.000.000,00	365	Laporan	8.000.000,00	365	Laporan	12.626.300,00	100,00	Laporan	2.829.000												100,00	2.829.000	0,27	22,41	465,00	10.829.000,00	127,40	15,04	
		3.30.04.2.02.0003	Sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	Laporan	648.000.000,00	5	Laporan	2.101.979.600,00	5	Laporan	928.657.000,00	4,00	Laporan	910.117.000												4,00	910.117.000	0,80	98,00	9,00	3.012.096.600,00	180,00	464,83	
		3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang dilaksanakan	72	Kali	180.000.000,00	72	Kali	13.515.400,00	72	Kali	15.249.500,00	0,50	Kali	1.000.000												0,50	1.000.000	0,01	6,56	72,50	14.515.400,00	100,69	8,06	
		3.30.04.2.03.0003	Subkegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	72	Laporan	126.000.000,00	72	Laporan	13.515.400,00	72	Laporan	15.249.500,00	5,00	Laporan	1.000.000												5,00	1.000.000	0,07	6,56	77,00	14.515.400,00	106,94	11,52	
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk ekspor unggulan daerah yang berhasil dipasarkan di luar Daerah	83,33	%	750.000.000,00	83,33	%	208.485.000,00	85,71	%	87.304.000,00	-	%	0,00												-	0	-	-	83,33	208.485.000,00	100,00	27,80	
		3.30.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi	30	Produk	750.000.000,00	30	Produk	208.485.000,00	35	Produk	87.304.000,00	-	Produk	0,00												-	0	-	-	30,00	208.485.000,00	100,00	27,80	
		3.30.05.2.01.0002	Sub kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	25	Pelaku Usaha	600.000.000,00	25	Pelaku Usaha	154.180.000,00	25	Pelaku Usaha	75.265.500,00	-	Pelaku Usaha	0,00												-	0	-	-	25,00	154.180.000,00	100,00	25,70	
		3.30.05.2.01.0004	Sub kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	15	Pelaku Usaha	150.000.000,00	15	Pelaku Usaha	54.305.000,00	15	Pelaku Usaha	12.038.500,00	-	Pelaku Usaha	0,00												-	0	-	-	15,00	54.305.000,00	100,00	36,20	
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	95	%	750.000.000,00	95	%	231.442.800,00	95	%	131.000.000,00	20,00	%	8.900.000,00												20,00	8.900.000	0,21	6,79	115,00	240.342.800,00	121,05	32,05	
		3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera dan tera ulang	50	%	750.000.000,00	50	%	231.442.800,00	50	%	131.000.000,00	10,00	%	8.900.000,00												10,00	8.900.000	0,20	6,79	60,00	240.342.800,00	120,00	32,05	
		3.30.06.2.01.0001	Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10600	Unit	690.000.000,00	10600	Unit	157.167.800,00	7500	Unit	105.500.000,00	500,00	Unit	1.400.000,00												500,00	1.400.000	0,07	1,33	11.100,00	158.567.800,00	104,72	22,98	
		3.30.06.2.01.0002	Sub kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2050	Org	60.000.000,00	2050	Org	74.275.000,00	1200	Org	25.500.000,00	500,00	Org	7.500.000,00												500,00	7.500.000	0,42	29,41	2.550,00	81.775.000,00	124,39	136,29	
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk unggulan daerah yang digunakan dan dipasarkan di dalam negeri	83,33	%	825.000.000,00	83,33	%	289.843.000,00	83,33	%	259.089.000,00	-	%	0,00												-	0	0	-	83,33	289.843.000,00	100,00	35,13	
		3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi	30	Produk	825.000.000,00	30	Produk	289.843.000,00	35	Produk	259.089.000,00	-	Produk	0,00												-	0	-	-	30,00	289.843.000,00	100,00	35,13	
		3.30.07.2.01.0006	Sub kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	30	Unit Usaha	825.000.000,00	30	Unit Usaha	289.843.000,00	35	Unit Usaha	259.089.000,00	-	Unit Usaha	0,00												-	0	-	-	30,00	289.843.000,00	100,00	35,13	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2024 s/d tahun 2026 (Periode RENSTRA)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2026 (%)									
														I			II			III								IV							
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%			
					K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Sat	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
5	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Industri	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang telah disahkan sebagai kebijakan	50	%	42.800.000.000,00	50	%	5.710.284.628,00	50	%	4.971.203.150,00	0,50	%	4.806.408,00											0,50	4.806.408	0,01	0,10	50,50	5.715.091.036,00	101,00	13,35	
		3.31.02.2.01	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang dihasilkan	50	%	42.800.000.000,00	50	%	5.710.284.628,00	50	%	4.971.203.150,00	0,50	%	4.806.408,00											0,50	4.806.408	0,01	0,10	50,50	5.715.091.036,00	101,00	13,35	
		3.31.02.2.01.0002	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	Dok	19.260.000.000,00	1	Dok	1.831.701.800,00	1	Dok	700.000.000,00	0,50	Dok	4.406.408,00											0,50	4.406.408	0,50	0,63	1,50	1.836.108.208,00	150,00	9,53	
		3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industr	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							2	Dok	170.000.000,00	-		0,00											-	0	-	-					
		3.31.02.2.01.0005	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3	Dok	18.832.000.000,00	3	Dok	3.878.582.828,00	3	Dok	4.101.203.150,00	-	Dok	400.000,00												-	400.000	-	0,01	3,00	3.878.982.828,00	100,00	20,60
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri yang telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi di SIINas	25	%	450.000.000,00	25	%	50.000.000,00	25	%	24.000.000,00	15,00	%	3.542.200,00											15,00	3.542.200	0,60	14,76	40,00	53.542.200,00	160,00	11,90	
		3.31.04.2.01	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdaftar di SIINAS	80	Unit Usaha	450.000.000,00	80	Unit Usaha	50.000.000,00	105	Unit Usaha	24.000.000,00	30,00	Unit Usaha	3.542.200,00											30,00	3.542.200	0,29	14,76	110,00	53.542.200,00	137,50	11,90	
	3.31.04.2.01.0003	Sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	20	Dok	450.000.000,00	20	Dok	50.000.000,00	20	Dok	24.000.000,00	5,00	Dok	3.542.200,00											5,00	3.542.200	0,25	14,76	25,00	53.542.200,00	125,00	11,90		

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Rekapitulasi Capaian Kinerja

Adapun capaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I (Maret 2025) dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2.
Realisasi Capaian Kinerja Utama
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Probolinggo
Tahun 2025 s/d TW I (s/d Maret 2025)

Sasaran Pembangunan RPD Kab. Probolinggo Tahun 2024 - 2026	Kinerja			
	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi s/d TW I 2025
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Birokrasi Pemerintah	Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Perangkat Daerah Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	%	1,30	Data baru ada akhir tahun
Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan omzet koperasi dan UM - Pertumbuhan omzet koperasi - Pertumbuhan omzet Usaha Mikro	%	29 4,5	4,08 Data baru ada akhir tahun
	Pertumbuhan sub sektor perdagangan	%	13,5	Data baru ada akhir tahun
	Pertumbuhan sub sektor industri	%	27	Data baru ada akhir tahun

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran diperlukan program dan kegiatan yang sesuai. Dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo.

Berikut merupakan hal-hal yang perlu disesuaikan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 antara lain :

1. Penyesuaian anggaran karena terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
2. Pergeseran rekening belanja antar kegiatan.
3. Penyesuaian anggaran pada aktifitas Pameran Dagang Nasional serta Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gerbang Wisata Sukapura karena sumber DBCHT tidak bisa digunakan pada urusan Perdagangan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perubahan Renja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							26.130.643.106,00	28.626.188.808,00	29.978.906.944,00	3.848.263.838,00					39.052.000.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.922.269.306,00	20.233.753.658,00	20.389.437.294,00	1.467.167.988,00							21.290.000.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.922.269.306,00	20.233.753.658,00	20.389.437.294,00	1.467.167.988,00							21.290.000.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sapik PD Nilai Sapik Perangkat Daerah				76 Nilai	76 nilai	18.125.900.306,00	18.834.079.658,00	18.292.963.294,00	1.524.099.694,00							19.650.000.000,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumenPerencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yangdisusun dan dilaporkan tepat waktu				20 Dokumen	20 Dokumen	816.218.000,00	139.451.400,00	135.451.400,00	-680.766.600,00			-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Perencanaan		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	115.000.000,00	129.150.000,00	125.150.000,00	10.150.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	11 Laporan	701.218.000,00	10.301.400,00	10.301.400,00	-690.916.600,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaporkan				19 Dokumen	19 Dokumen	13.049.051.378,00	14.854.769.366,00	14.491.277.212,00	1.442.225.834,00			-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan		14.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/ bulan	120 Orang/ bulan	12.994.051.378,00	14.844.449.966,00	14.484.957.812,00	1.490.906.434,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			13.860.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				19 Laporan	19 Laporan	55.000.000,00	10.319.400,00	6.319.400,00	-48.680.600,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			140.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Pengelolaan BMD pada PD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu				4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	4.106.000,00	4.106.000,00	-30.894.000,00			-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Barang Milik Daerah		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	4.106.000,00	4.106.000,00	-30.894.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah yang dilaporkan tepat waktu				21 Dokumen	21 Dokumen	80.000.000,00	155.030.800,00	155.030.800,00	75.030.800,00			-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Pendapatan		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				19 Dokumen	19 Dokumen	80.000.000,00	155.030.800,00	155.030.800,00	75.030.800,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan administrasi umum PD				100 %	100 %	167.667.870,00	115.257.000,00	91.028.250,00	-76.639.620,00			-	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>				40 Unit Usaha	30 Unit Usaha	41.369.000,00	34.997.000,00	18.203.000,00	-23.166.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM PENINGKATAN KUALITAS SDM			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	45.000.000,00	45.000.000,00	30.804.500,00	-14.195.500,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM PENINGKATAN KUALITAS SDM			125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya				92 persen	92 persentase	25.000.000,00	25.000.000,00	16.604.000,00	100.000.000,00							125.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya</i>				82 %	82 %	25.000.000,00	25.000.000,00	16.604.000,00	-8.396.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SDM PENINGKATAN KUALITAS SDM	Koperasi		125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	25.000.000,00	25.000.000,00	16.604.000,00	-8.396.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM PENINGKATAN KUALITAS SDM			125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Kualitas Koperasi yang meningkat kapasitas SDMnya				75 persen	75 persentase	105.000.000,00	128.969.000,00	770.330.750,00	95.000.000,00							200.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan</i>				25 %	25 %	105.000.000,00	128.969.000,00	770.330.750,00	665.330.750,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SDM PENINGKATAN KUALITAS SDM	Koperasi		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>				240 Orang	750 Orang	105.000.000,00	128.969.000,00	770.330.750,00	665.330.750,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM PENINGKATAN KUALITAS SDM			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya				25 persen	25 persentase	125.000.000,00	115.708.000,00	69.631.750,00	25.000.000,00							150.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi</i>				35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	125.000.000,00	115.708.000,00	69.631.750,00	-55.368.250,00			-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU	Koperasi		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota</i>				30 Unit Usaha	15 Unit Usaha	125.000.000,00	115.708.000,00	69.631.750,00	-55.368.250,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU MEMBUKA SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peresentase UM yang meningkat omzetnya				5 persen	5 persentase	230.000.000,00	1.020.000.000,00	1.070.900.000,00	410.000.000,00							640.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah Usaha Mikro yang telah diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>				600 Unit Usaha	600 Unit Usaha	230.000.000,00	1.020.000.000,00	1.070.900.000,00	840.900.000,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SDM PENINGKATAN KUALITAS SDM	Usaha Mikro		640.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>				110 Unit Usaha	850 Unit Usaha	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM PENINGKATAN KUALITAS SDM			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>				8300 Unit Usaha	2400 Unit Usaha	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM PENINGKATAN KUALITAS SDM			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>				100 Unit Usaha	45 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	10.900.000,00	-39.100.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM PENINGKATAN KUALITAS SDM			240.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>				425 Orang	1370 Orang	90.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	910.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM PENINGKATAN KUALITAS SDM			240.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				72 Laporan	15 Laporan	13.515.400,00	30.000.000,00	15.249.500,00	1.734.100,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PENGENDALIAN INFLASI DAERAH			42.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk ekspor unggulan daerah yang berhasil dipasarkan di luar Daerah				85,71 Persentase	85,71 persentase	230.000.000,00	120.000.000,00	83.484.960,00	65.000.000,00							295.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk Ekspor unggulan daerah yang difasilitasi promosi				35 produk	35 produk	230.000.000,00	120.000.000,00	83.484.960,00	-146.515.040,00			-	PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PENGENDALIAN INFLASI DAERAH	Produk		295.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				25 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	190.000.000,00	95.000.000,00	75.265.500,00	-114.734.500,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PENGENDALIAN INFLASI DAERAH			255.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				15 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	40.000.000,00	25.000.000,00	8.219.460,00	-31.780.540,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PENGENDALIAN INFLASI DAERAH			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku				95 Persentase	95 persentase	300.000.000,00	191.000.000,00	112.092.000,00	0,00							300.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera dan tera ulang				50 %	50 %	300.000.000,00	191.000.000,00	112.092.000,00	-187.908.000,00			-	PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PENGENDALIAN INFLASI DAERAH	Konsumen		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				10700 Unit	7500 Unit	225.725.000,00	153.970.000,00	86.592.000,00	-139.133.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PENGENDALIAN INFLASI DAERAH			276.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				2050 Orang	1200 Orang	74.275.000,00	37.030.000,00	25.500.000,00	-48.775.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PENGENDALIAN INFLASI DAERAH			24.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-				85,71 Persentase	85,71 Persentase	280.000.000,00	20.000.000,00	259.089.000,00	20.000.000,00							300.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi				35 produk	35 produk	280.000.000,00	20.000.000,00	259.089.000,00	-20.911.000,00			-	PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PENGENDALIAN INFLASI DAERAH	Produk Dalam Negeri		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				35 UMKM	15 UMKM	280.000.000,00	20.000.000,00	259.089.000,00	-20.911.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PENGENDALIAN INFLASI DAERAH			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							5.846.701.800,00	5.021.203.150,00	6.139.564.690,00	292.862.890,00							15.450.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	% Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang telah disahkan sebagai kebijakan				50 Persentase	50 persen	5.681.701.800,00	4.971.203.150,00	6.132.164.690,00	9.368.298.200,00							15.050.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	% Draft Kebijakan Pembangunan Industri yang dihasilkan				50 %	50 %	5.681.701.800,00	4.971.203.150,00	6.132.164.690,00	450.462.890,00			-	PENINGKATAN KUALITAS SDM PENINGKATAN KUALITAS SDM	Industri Kecil dan Menengah		15.050.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	0 Dokumen	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM PENINGKATAN KUALITAS SDM			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	1.831.701.800,00	700.000.000,00	1.860.961.540,00	29.259.740,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM PENINGKATAN KUALITAS SDM			6.750.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	0 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM PENINGKATAN KUALITAS SDM			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Probolinggo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM PENINGKATAN KUALITAS SDM			900.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

J U M L A

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 disusun untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 semester I menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut.

Renja Perubahan ini merupakan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, Juli 2025

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



TAUPIK ALAMI, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700108 199602 1 001